

BAB II

GAMBARAN TENTANG BPJS KETENAGAKERJAAN SECARA UMUM DAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEMARANG MAJAPAHIT

Bab II dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan penjelasan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan secara umum dan spesifik BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sebagai sebuah lembaga non profit pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

2.1. Sejarah dan Profil BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan yang lahir dalam proses yang cukup panjang. Awalnya, tepat pada tahun 1977 pemerintah Indonesia membentuk program Asuransi Sosial Ketenagakerjaan (Astek) melalui PP No. 33 Tahun 1977 guna memberikan perlindungan dasar bagi para tenaga kerja di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1992, Astek bertransformasi menjadi PT Jamsostek berdasarkan UUD No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, pada akhir tahun 2004 pemerintah menetapkan UUD No.4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menekankan terkait manfaat perlindungan bagi para pekerja agar lebih aman dan tetap produktif. Tonggaknya adalah pada tahun 2014, PT Jamsostek bertransformasi menjadi sebuah badan hukum publik yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan dengan memiliki 3 program awal, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kemudian, kini program tersebut sudah bertambah dengan 2 program baru, yakni jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sejak saat itu, BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Indonesia hingga saat ini (BPJS Ketenagakerjaan.co.id, 2025).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki visi dan misi dalam tugasnya menjadi penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Visi

dari BPJS Ketenagakerjaan adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Sedangkan, misi dari BPJS ketenagakerjaan ada 3 poin. Pertama, melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Kedua, memberikan rasa aman mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan ketiga, memberikan kontribusi dalam Pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki nilai budaya sebagai sebuah kode etik yang terus dipegang, yakni iman, ekselen, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, dan antusias (BPJS Ketenagakerjaan.co.id, 2025)

2.2. Program-program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan. Berikut ini adalah program-program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan :

A. Jaminan Hari tua (JHT)

Program perlindungan yang diberikan untuk tujuan menjamin para peserta yang sudah masuk di masa pensiun, mengalami risiko cacat total tetap, atau meninggal dunia agar menerima bantuan manfaat uang tunai.

B. Jaminan Kematian (JKM)

Program ini akan diberikan kepada sang ahli waris dengan berupa manfaat uang tunai ketika peserta meninggal dunia bukan diakibatkan risiko dalam bekerja.

C. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini akan diberikan kepada peserta yang mengalami risiko dalam bekerja dengan berupa manfaat uang tunai dan/atau fasilitas kesehatan.

D. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program ini ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta mengalami kehilangan pekerjaan dengan berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

E. Jaminan Pensiun (JP)

Program perlindungan yang diberikan berupa manfaat uang tunai ketika peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

2.3. Profil BPJS Ketenagakerjaan

Dalam sebuah organisasi atau lembaga, fungsi dari struktur organisasi adalah untuk memperjelas dan mengatur bagaimana alur komunikasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi dibagikan dan dijalankan. Berikut adalah struktur dari BPJS Ketenagakerjaan :

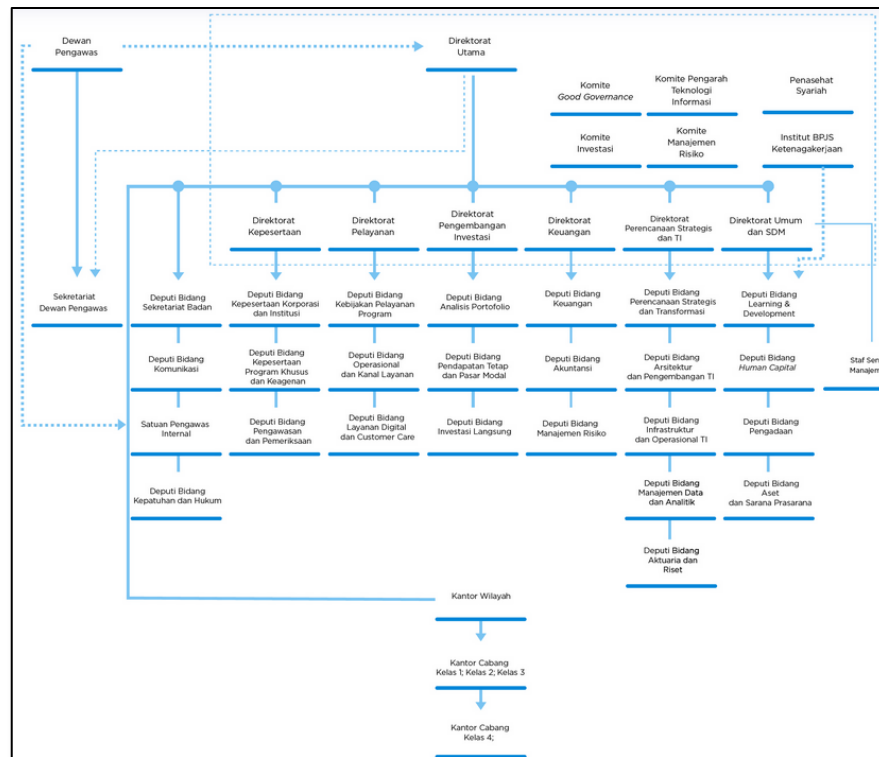
A. Dewan Pengawas

1. Ketua Dewan Pengawas : Muhammada Zuhri
2. Anggota Dewan Pengawas : Agung Nugroho, H. Yayat Syariful Hidayat, Kushari Suprianto, M. Aditya Warman, M. Iman N. H. B. Pinuji, Subchan Gatot

B. Direksi

1. Direktur Kepesertaan : Pramudya Iriawan Buntoro
2. Direketur Pelayanan : Roswita Nilakurnia SE, MSM, CRGP, CGP
3. Direktur Pengembangan Investasi : Edwin Ridwan, CFA, FRM
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Asep Rahmat Suwandha
5. Direktur Perencanaan dan Teknologi Informasi : Zainudin
6. Direktur Human Capital dan Umum : Abdur Rahman Irsyadi

Gambar 2.1. Bagan Struktur BPJS Ketenagakerjaan

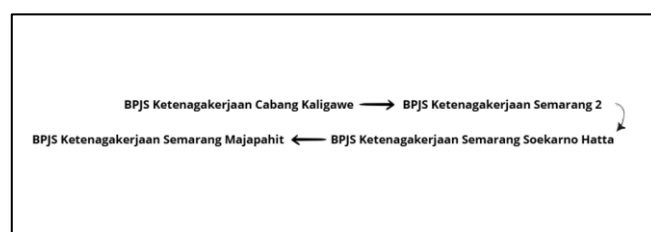


Sumber : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

2.4. Profil BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit

BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit mulai berdiri pada sekitar tahun 2003. BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit adalah salah satu kantor cabang di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit beralamatkan di Jl. Brigjen Sudiarto No.4, Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192. BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sebelumnya sempat mengalami beberapa kali perubahan penyebutan nama sebagai berikut :

Gambar 2.2. Perubahan Nama BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit



Tugas dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sendiri sudah tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial untuk para pekerja (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2015). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit memiliki visi, misi, dan nilai budaya yang sama dengan ketentuan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan pusat.

2.5. Struktur BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit

Dalam sebuah organisasi atau lembaga, fungsi dari struktur organisasi adalah untuk memperjelas dan mengatur bagaimana alur komunikasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi dibagikan dan dijalankan. Berikut adalah struktur dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit :

Gambar 2.3 Bagan Struktur BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit

